

## **PENAFSIRAN KEKUATAN BAHASA DALAM TEKS PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA: PENDEKATAN HERMENEUTIKA**

**Gatut Setiadi**

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam  
Sunan Kalijogo, Malang, INDONESIA

Email: [gatutxxx@gmail.com](mailto:gatutxxx@gmail.com)

Submit: 12-01-2024, Revisi: 13-03-2024, Terbit: 29-04-2024

DOI: 10.20961/basastra.v12i1.83275

**Abstrak.** Berbagai aspek seperti sejarah, latar belakang penulis, dan unsur budaya sebagai bagian dari proses terbentuknya suatu teks tertentu menjadikan setiap kata atau kalimat dalam Bahasa Indonesia itu mampu memiliki suatu unsur yang sangat penting untuk dikaji, yakni kekuatan atau kekuasaan Bahasa (*language power*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kekuatan bahasa yang terkandung dalam teks pancasila, sehingga dapat dipahami secara komprehensif sebagai ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu, Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hermeneutika. Yang menjadi data penelitian adalah teks Pancasila. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis dokumen. Uji validitas data dilakukan dengan triangulasi teori, sedangkan analisis data dengan model analisis mengalir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiap kalimat dalam teks pancasila mengandung kekuatan bahasa serta berperan dalam konsep kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang mencakup makna (1) Berketuhanan, (2) Berperikemanusiaan, (3) Persatuan, (4) Permusyawaratan, dan (5) Berkeadilan sosial. Dari hasil penelitian ini dapat dikaji lebih lanjut tentang bentuk kekuatan bahasa dalam tiap aspek sila dalam konsep kehidupan masyarakat secara nyata yang relevan dengan perkembangan teknologi dan budaya.

**Kata kunci:** hermeneutika, *language power*, teks pancasila

## **INTERPRETATION THE POWER OF LANGUAGE IN THE TEXT OF PANCASILA AS THE STATE IDEOLOGY: A HERMENEUTIC APPROACH**

**Abstract.** Various aspects such as history, author's background, and cultural elements as part of the process of forming a particular text make every word or sentence in Indonesian able to have a very important element to be studied, namely the power or power of language (*language power*). The purpose of this study is to describe the power of language contained in the Pancasila text, so that it can be comprehensively understood as the ideology of the Indonesian nation. Therefore, this research was conducted with a hermeneutic approach. The research data is the text of Pancasila. The data analysis technique applied is document analysis. The data validity test was carried out with theoretical triangulation, while the data analysis with a flow analysis model. The results of this study indicate that each sentence in the Pancasila text contains the power of language and plays a role in the concept of national and social life which includes the meaning of (1) Godly, (2) Humane, (3) Unity, (4) Bargaining, and (5) Social justice. From the results of this study, it can be further studied about the form of language power in each aspect of the precepts in the concept of real community life that is relevant to technological and cultural developments.

**Keywords:** hermeneutics, *language power*, text of pancasi

## PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan pastinya memiliki unsur *language power* yang diwujudkan dalam bermacam-macam teks untuk berbagai keperluan. Kata *power* dalam hal ini dapat dipahami sebagai suatu konsep yang bersifat kuat dan menguasai serta memberikan berpengaruh penting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan konsep tersebut, *language power* dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kekuatan maupun kekuasaan, hal ini menjadikan Bahasa Indonesia mampu membuat manusia baik secara individu maupun kelompok mau dan patuh melaksanakan suatu hal sesuai konteks Bahasa tersebut. Dengan mempelajari *language power* ini maka akan diketahui suatu konsep *language power* dalam perannya sebagai kontrol sosial di masyarakat atau negara yang diterapkan dalam sebuah teks. Salah satu teks bahasa Indonesia yang sangat monumental dan sangat bersejarah dalam perkembangan Negara Indonesia adalah teks Pancasila, suatu teks yang telah menjadi ideologi Bangsa Indonesia selama puluhan tahun.

Teks Pancasila merupakan hasil perumusan dan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Latief menyatakan bahwa Nilai-nilai Pancasila sebagaimana diketahui bukanlah merupakan sesuatu yang berasal dari proyek 'impor' dari negara lain, melainkan Pancasila merupakan refleksi kritis dan titik kulminasi antara berbagai nilai yang berakar dan bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia (dalam Prasetyo, 2023). Teks ini memiliki lima sila yang mengandung nilai-nilai luhur serta bersifat universal, teks Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. (Surat Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila, 2016). Kalimat-kalimat pada setiap sila dalam teks Pancasila tersusun saling berkaitan dan menyatu. Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila yang menimbang bahwa "Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Pemerintah Indonesia, "Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila," Pub. L. No. Nomor 24 Tahun 2016, 1 (2016). Keputusan Presiden ini menandakan bahwa Pancasila harus selalu dipahami sebagai ideologi bangsa dan diwariskan secara turun temurun ke setiap generasi. Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mendirikan negara, dalam hal ini sering juga disebut *philosophische grondslog* atau *weltanschauung* yang merupakan pikiran-pikiran terdalam, hasrat terdalam warga negaranya, untuk di atasnya didirikan suatu negara (Suryatni, 2014).

Tantangan paling besar bagi Indonesia adalah kemajemukannya. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan ratusan komunitas etnik, budaya dan agama serta berbagai ragam bahasa daerah. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi hal sangat penting karena Pancasila memecahkan masalah yang dihadapi negara yang terdiri atas pelbagai komunitas etnik, budaya atau agama tersebut. (Magnis Suseno Franz,

2022) Tetapi seiring berkembangnya zaman, teks ini hanya dibacakan dalam acara ceremonial seperti upacara bendera atau dipajang sebagai formalitas di suatu lembaga tertentu, hal ini yang membuat masyarakat (generasi bangsa) umumnya hanya memahami teks Pancasila dalam bentuk susunan kalimatnya saja (bersifat hafalan) tanpa memahami kekuatan besar (*language power*) yang terkandung di dalam setiap kata dalam teks Pancasila. Jika hal ini dibiarkan, maka konsep ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara semakin lama akan semakin luntur dan akan mengakibatkan kurang pahami masyarakat Indonesia terhadap Ideologi bangsanya sendiri. Jika hal tersebut terjadi akan menjadi bahaya besar bagi bangsa Indonesia jika suatu saat nanti akan ada upaya perubahan ideologi bangsa yang akan merusak konsep berbangsa dan bernegara. Maka itu, untuk mencegah hal tersebut, analisis interpretasi makna secara komprehensif terhadap teks Pancasila menggunakan kajian hermeneutika sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk *language power* yang terkandung di dalam teks tersebut, “sebab penafsiran dalam perspektif hermeneutika juga mencakup semua ilmu yang dimungkinkan ikut membentuknya: psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah, dan lain-lain.”(Acep Iwan Saidi, 2008)

Penelitian menggunakan kajian hermeneutika banyak digunakan pada teks lagu, novel, budaya, hukum, dan karya sastra lain. Seperti penelitian Fajar Sugianto, dkk. dari Universitas Pelita Harapan Jakarta yang berjudul “*Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum*”. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa hermeneutika adalah benar sebagai metode penafsiran hukum dalam memberikan hasil interpretasi teks hukum yang hakikatnya sebagai sarana dan cara manusia untuk menafsirkan persoalan, dalam hal ini hakim membangun pemahaman dan memperoleh hasil yang sah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Pengetahuan tentang adanya hermeneutika yang telah teruji kebenarannya sehingga hasil penafsiran tersebut terukur dan teruji. Hermeneutika sebagai suatu metode dapat digunakan sebagai alternatif kajian hukum terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang dikaji dan ditelaah dengan menggunakan dua sisi hermeneutika, yaitu sisi pemahaman (*verstehenden*) dan sisi ekplanasi (*erklarenden*). *Verstehen* sebagai sarana memahami (*understand*) untuk mengetahui motif atau alasan menyebabkan berbuat sesuatu, dengan menempatkan pikiran dan tingkah laku objek yang dikaji dengan pihak pengkaji. *Erklarenden* digunakan untuk menjelaskan (*explain*) suatu fenomena menurut hukum terjadinya sebakibat. (Sugianto et al., 2021)

Selain itu, penelitian dari M. Ied Al Munir dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berjudul “*Hermeneutika sebagai Metode dalam Kajian Kebudayaan*”. Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan. Pertama, kebudayaan tidak hanya bersifat statis tapi juga dinamis sehingga dibutuhkan metode pengkajian yang juga bersifat dinamis. Kedua, hermeneutika dapat diaplikasikan sebagai metode dalam kajian kebudayaan karena wujudnya yang berupa pemahaman atau intepretasi atas tindakan manusia sebagai perwujudan kebudayaan. Ketiga, arti

penting metode hermeneutika bagi kajian kebudayaan adalah karena sifatnya yang dialogis dan dinamis sehingga berkesesuaian dengan dinamika kebudayaan.(Sugianto et al., 2021)

Jadi untuk memunculkan suatu kajian baru dari hermeneutika dan berdasarkan permasalahan berkaitan kurangnya pemahaman masyarakat tentang *language power* dalam teks Pancasila, maka dalam penelitian ini akan mengkaji bentuk *language power* yang terkandung dalam teks Pancasila. Tujuannya yakni memberikan wawasan baru tentang interpretasi unsur kekuatan bahasa yang terkandung di dalam setiap sila pada teks Pancasila, sehingga hasil interpretasi makna teks tersebut dapat dipahami oleh bangsa Indonesia secara komprehensif dengan dasar-dasar yang mendukung kebenarannya dan akan benar-benar menjadi ideologi bangsa Indonesia secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini akan dapat terwujud jika kekuatan bahasa pada makna sebenarnya dari teks Pancasila telah dipahami dengan sangat mendalam oleh setiap warga negara Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menurut Arikunto adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.(Arikunto, 2019) Maka itu, sesuai dengan aspek yang diteliti yakni tentang analisis *language power* yang terkandung dalam teks pancasila dengan menggunakan metode hermeneutika, yakni sebuah metode pendekatan penelitian yang berkaitan langsung dengan penafsiran atau interpretasi yang erat kaitannya dengan konsep wacana tulisan. Metode ini berdasarkan pada asumsi bahwa teks

adalah sebuah ekspresi dari pengalaman, pikiran, dan perasaan penulisnya, yang harus ditafsirkan dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan bahasa yang melingkupinya.

Teori hermeneutika yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep hermeneutika dari salah satu tokoh hermeneutika yaitu Frederich August Wolf dengan 3 bentuk konsep Interpretasi yaitu: (1) interpretasi gramatikal (bahasa), (2) interpretasi Historikal (fakta dan waktu), (3) interpretasi retorikal (mengontrol kedua interpretasi tersebut).(Diarsa, 2011) Interpretasi retorikal bertujuan untuk mengungkapkan maksud, tujuan, dan efek dari teks pancasila. Interpretasi retorikal juga mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan nilai dari teks pancasila. Teori hermeneutika ini akan diperkuat dengan pendekatan dialektis-filosofis. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog antara penulis, teks, dan pembaca dalam mencari kebenaran dan makna.

Teks Pancasila adalah teks yang memiliki *language power* sangat tinggi, karena teks ini merupakan dasar negara dan ideologi bangsa yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Teks Pancasila juga merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang dan kompleks, yang melibatkan perjuangan, kompromi, dan konsensus dari berbagai pihak. Teks Pancasila juga memiliki makna yang dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan masa depan. Untuk menganalisis *language power* pada teks Pancasila menggunakan kajian hermeneutika dalam teks Pancasila dapat dilakukan dengan mengkaji aspek-aspek berikut berikut, (1) makna Simbolis, hermeneutika memungkinkan untuk melihat makna simbolis di balik

kata-kata dalam teks Pancasila. Misalnya, makna lambang-lambang seperti "Ketuhanan Yang Maha Esa" atau "Keadilan Sosial, dll.". (2) Interpretasi, melalui kajian hermeneutika, peneliti dapat menginterpretasikan teks Pancasila dari berbagai sudut pandang. Misalnya, menganalisis bagaimana makna dan tujuan Pancasila diinterpretasikan oleh berbagai kelompok masyarakat. (3) Kuasa dan Dominasi: Analisis hermeneutika dapat mengungkapkan tentang kuasa dan dominasi dalam teks pancasila. misalnya, melihat cara interpretasi Pancasila membentuk hubungan kekuatan antara penguasa dan rakyat. (4) Konteks Sejarah, melalui hermeneutika, dapat dipahami bagaimana teks Pancasila terbentuk dalam konteks sejarahnya. Misalnya, menelusuri latar belakang dan perubahan yang terjadi dalam Pancasila sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini. (5) Dialog dan Relevansi, melalui analisis hermeneutika, peneliti dapat mencari konteks teks Pancasila saat ini dan bagaimana relevansinya dalam konteks sosial, politik, dan budaya terkini. Misalnya, melihat bagaimana teks Pancasila berdialog dengan isu-isu kontemporer seperti pluralisme, demokrasi, atau globalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

### *Language Power* dalam Bahasa

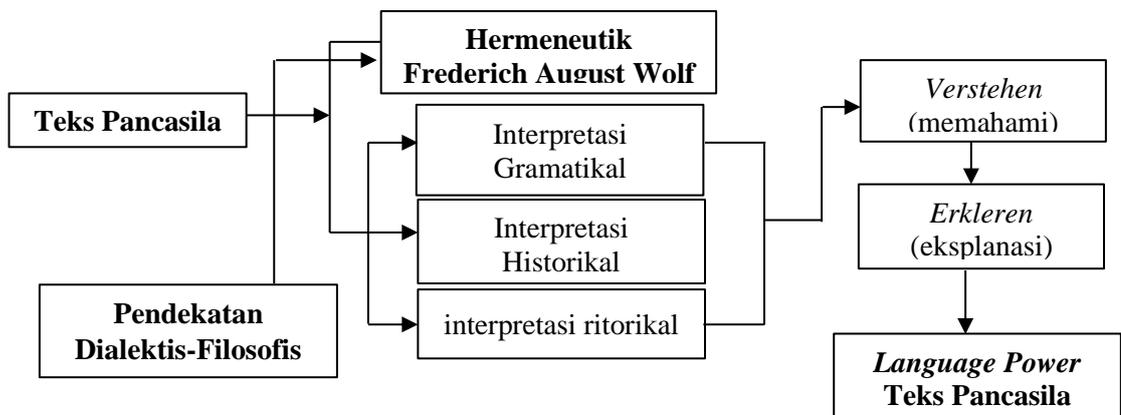
*Language power* adalah kemampuan bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat persuasi, manipulasi, dominasi, atau emansipasi. Dengan demikian, bahasa memiliki kekuatan atau *power* yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. *Language power* juga dapat mengacu pada hubungan antara bahasa dan

kekuasaan dalam komunikasi. Hal ini disebabkan melalui bahasa, seseorang mampu mempengaruhi, membujuk, mengendalikan, atau memanipulasi orang lain. Bahasa juga menciptakan kekuatan dan kekuasaan sesuai konteks bahasa tersebut digunakan. Kekuatan bahasa (*language power*) dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama Kekuatan instrumental, yang dimaksud kekuasaan instrumental dipandang sebagai kekuasaan otoritatif. Biasanya, seseorang yang memiliki kekuatan instrumental mempunyai kekuatan hanya karena siapa mereka. Orang-orang ini tidak perlu meyakinkan siapa pun tentang kekuatan mereka atau membujuk siapa pun untuk mendengarkan mereka, orang lain harus mendengarkan mereka hanya karena otoritas yang mereka miliki. Kedua yaitu kekuatan yang berpengaruh, artinya kekuasaan yang berpengaruh mengacu pada ketika seseorang (atau sekelompok orang) tidak memiliki otoritas apa pun tetapi berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh atas orang lain. Mereka menggunakan bahasa untuk membujuk orang lain agar percaya atau mendukung mereka. Jenis kekuasaan ini sering ditemukan dalam politik, media, dan pemasaran. Ciri-ciri bahasa kekuasaan yang berpengaruh meliputi: (a) penegasan, menyajikan opini sebagai fakta; (b) metafora, penggunaan metafora yang sudah mapan dapat meyakinkan audiens dan membangkitkan kekuatan ingatan, membangun ikatan antara pembicara dan pendengar; (c) bahasa yang sarat muatan bahasa yang dapat membangkitkan emosi yang kuat dan/atau mengeksploitasi perasaan; (d) asumsi yang tertanam, misalnya asumsi pendengar benar-benar tertarik dengan apa yang disampaikan pembicara;

## Teori Hermeneutika Frederich August Wolf

Hermeneutika secara umum adalah ilmu atau seni tentang bagaimana memahami dan menafsirkan teks dengan mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, sosial, dan psikologis dari pengarang, pembaca, dan teks itu sendiri. (Pamungkas, 2018) Kata hermeneutik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “*hermeneuein*” yang berarti menafsirkan, dan kata bendanya “*hermeneia*” yang berarti interpretasi, penafsiran, ungkapan, pemberitahuan dan terjemah,<sup>1</sup> sedangkan Lorens Bagus berpendapat hermeneutik berarti ilmu atau teori tentang penafsiran yang bertujuan menjelaskan teks mulai dari ciri-cirinya, baik obyektif (arti gramatikal kata-kata dan variasi-variasi historisnya), maupun secara subyektif (unsur-unsur yang

mempengaruhinya). (Bagus, 2005) Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hermeneutika merupakan sebuah cabang ilmu yang menjelaskan suatu teks, wacana, syair, lirik dan lain-lain dengan cara menafsirkannya dan menginterpretasikan susunan kata, kalimat dan juga sejarahnya. Teori hermeneutika yang akan digunakan untuk menginterpretasikan teks Pancasila guna menemukan bentuk *language power* adalah teori hermeneutika dari Frederich August Wolf, sebuah teori yang mengajarkan bagaimana menafsirkan teks-teks kuno dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan bahasa dari teks tersebut. Berikut ini gambar bagan teori hermeneutika Frederich August Wolf yang diterapkan dalam tes Pancasila.



Gambar 1

### Bagan Teori Hermeneutik Frederich August Wolf

Berdasarkan bagan tersebut dapat dipahami bahwa teori ini menerapkan tiga level hermeneutika (1) *interpretatio gramatica*, interpretasi gramatikal (bahasa), berhubungan dengan bahasa mengkaji kalimat atau kata dengan mengungkapkan makna

yang ada di dalam teks yang dapat menentukan pemahaman (2) *historica*, interpretasi historikal (fakta dan waktu) mengacu pada fakta historis, dan dunia kehidupan pengarang, untuk memahami pengetahuan yang dimaksudkan pengarang atau dengan mempelajari dan

<sup>1</sup> Richard E Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005): 14.

mengenali fakta-fakta dan menyusun kesimpulan mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau, menilai dan menafsirkan fakta yang diperoleh secara sistematis dan objektif untuk dapat memahami masa lampau sebagai dasar penafsiran teks. (3) *philosophica*, interpretasi retorikal (mengontrol kedua interpretasi tersebut) maksudnya sebagai uji validitas logika agar hermeneutika *interpretatio gramatica*, dan *hermeneutika historica* menjadi logis dan masuk akal. Tiga level dari teori ini akan digunakan untuk menafsirkan makna secara langsung melalui (*Verstehen und erklaren*) atau pemahaman dan eksplanasi. (1) *Verstehen* (*understanding* atau memahami) berfungsi menjelaskan secara komprehensif tentang hasil analisis dari (a) *interpretatio gramatica*, interpretasi gramatikal (bahasa), (b) *historica*, interpretasi historikal (fakta sejarah dan waktu), (c) *philosophica*, interpretasi retorikal (mengontrol kedua interpretasi tersebut) yakni berbagai hal tentang teks Pancasila. (2) *Erklaren* (eksplanasi) lisan atau tulisan. berfungsi memberikan makna secara lisan dan tulisan, konsep ini harus berdasarkan pada komunitas yang dijadikan objek dialog atau kepada siapa interpretasi itu ditunjukkan. Karena Penelitian ini berkaitan dengan teks Pancasila yang ditujukan kepada Bangsa Indonesia, maka makna yang dimunculkan secara langsung akan berdasarkan pada karakteristik dari Bangsa Indonesia.

Penerapan teori hermeneutik Frederich August Wolf ini akan diperkuat dengan penggunaan pendekatan dialektis-filosofis, yang berupaya memahami makna universal teks dengan cara mengaitkan masa lalu dan masa kini dalam sebuah dialog kritis dan reflektif. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog antara

penulis, teks, dan pembaca dalam mencari kebenaran dan makna. Sebab antara hermeneutika dengan bahasa (teks) akan terjalin hubungan sangat dekat, tiga makna hermeneutika yang mendasar yaitu: (a) mengungkapkan sesuatu yang tadinya masih dalam pikiran melalui kata-kata sebagai medium penyampaian; (b) menjelaskan secara rasional sesuatu sebelum masih samar-samar sehingga maknanya dapat dimengerti; (c) menerjemahkan suatu bahasa yang asing ke dalam bahasa lain. Tiga pengertian tersebut terangkum dalam konsep menafsirkan, interpreting, understanding. Dengan demikian hermeneutika merupakan proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.

## PEMBAHASAN

### **Analisis *Language Power* dalam Teks Pancasila Menggunakan Teori Hermeneutika Frederich August Wolf**

Asal-usul Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari berbagai faktor dan nilai-nilai yang terkandung dalam bangsa Indonesia yang kemudian ditinjau dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini yang kemudian menjadikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara (Prasetyo, 2023). Teks Pancasila sebagai suatu teks yang telah menjadi dasar ideologi bangsa Indonesia mulai dari awal kemerdekaan sampai saat ini. Kebenaran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara tetap diyakini oleh masyarakat karena mampu mengimbangi dinamika perkembangan zaman. Pancasila mampu bertahan menghadapi dinamika persoalan bangsa, menangkal disalahkan, dan menghadapi penyangkalan. (Sumaryati & Sukmayadi, 2021). Adapun dasar itu harus berupa suatu falsafah yang

menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. (Suryatni, 2014). Maka itu teks Pancasila ini pastilah mengandung suatu kekuatan bahasa (*language power*) yang besar disetiap kalimat dalam sila-sila yang tertulis sebagai satu kesatuan Pancasila.

Bentuk *language power* ini sangat perlu diketahui dan juga dipahami dengan tepat dan benar sehingga makna sebenarnya dari teks Pancasila ini bukan hanya dihafalkan namun juga diterapkan dalam konsep kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga akan terciptanya suatu Negara Indonesia yang sesuai dengan cita-cita para pahlawan pendiri bangsa, yakni menjadi Negara Indonesia yang berkeTuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur. Maka itu untuk memahami bentuk *language power* dalam teks Pancasila ini akan digunakan kajian hermeneutika dengan menerapkan teori hermeneutika dari Frederich August Wolf, sebab teori dari salah satu tokoh hermeneutika ini dinilai sangat tepat untuk menginterpretasikan (pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu; tafsiran) (Tim Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023) teks Pancasila. sebab teori ini menekankan pada tiga aspek hermeneutika yaitu: (1) *interpretatio gramatica*, interpretasi gramatikal (bahasa), (2) *historica*, interpretasi historikal (fakta dan waktu) (3) *philosophica*, interpretasi ritorikal (mengontrol kedua interpretasi tersebut).

### **Teori Hermeneutika Frederich August Wolf**

Setiap teks mempunyai makna mendalam yang dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Berikut bentuk

penafsiran makna terhadap teks Pancasila menggunakan teori hermeneutika Frederich August Wolf untuk memahami bentuk *language power* dalam teks tersebut:

#### **1. Interpretasi Gramatikal (bahasa)/ *interpretatio gramatica***

Teks Pancasila memiliki lima sila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan masih menjadi ideologi Bangsa Indonesia sampai saat ini dengan susunan kalimat sebagai berikut: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Persatuan Indonesia. (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut akan dianalisis berdasarkan makna leksikal dan kontekstual yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau bangsa Indonesia.

#### **Sila 1**

##### **Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pada sila pertama ini, ada satu kata yang menjadi dasar dari kalimat sila pertama Pancasila, yakni kata "Ketuhanan". Secara leksikal kata Ketuhanan dimaknai sebagai (1) sifat keadaan Tuhan, (2) segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, atau hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, (3) ilmu-ilmu mengenai keadaan Tuhan dan agama, (4) dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata "Maha" memiliki makna sangat; amat; teramat (tentang Tuhan). Menurut KBBI, kata "Esa" berarti (1) tunggal atau satu, (2) bersifat tunggal, tidak bersekutu. Sedangkan kata Jadi, Ketuhanan yang Maha Esa artinya adalah Tuhan yang sangat tunggal atau satu-satunya. (Tim Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023) Jadi Ketuhanan yang Maha Esa secara leksikal dapat disimpulkan bahwa kalimat ini memiliki dasar untuk menguatkan ideologi melalui makna bahwa Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang tunggal, tidak bersekutu, dan tidak terbagi.

Secara kontekstual makna ketuhanan adalah makna yang berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan pengatur segala sesuatu. Makna ketuhanan juga mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesama manusia, dan antara manusia dengan alam semesta. Makna ketuhanan dapat berbeda-beda tergantung pada agama, budaya, dan pandangan hidup masing-masing orang. Jadi jika dikaitkan dengan Bangsa Indonesia yang beragam dan Multikultural, makna **Ketuhanan Yang Maha Esa** adalah makna bahwa bangsa Indonesia dari berbagai agama yang sah dan diakui oleh pemerintah, semua penganutnya mengakui adanya satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Makna ini juga mengandung nilai-nilai seperti toleransi, kerukunan, ketaatan, dan pengabdian kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut setiap warga negara Indonesia. Makna ini juga mengandung nilai-nilai seperti menjalankan perintah agama, menghormati orang lain, dan menjaga lingkungan<sup>4</sup>.

Berdasarkan makna leksikal dan kontekstualnya, maka *language power* yang muncul dalam kata **Ketuhanan yang Maha Esa** dalam sila pertama teks Pancasila adalah menguatkan kesadaran serta keyakinan masyarakat dalam menganut agamanya sendiri dan mengakui agama orang lain sebagai bagian dari keberagaman kehidupan

beragama di Indonesia. Kalimat **Ketuhanan yang Maha Esa** tidak merujuk pada salah satu agama manapun (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu)(Portal Informasi Indonesia, 2023), konteksnya adalah agama secara umum. Maka itu hal inilah yang menguatkan kalimat tersebut, sehingga seluruh Bangsa Indonesia menerima dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan beragama di daerah mereka masing-masing, sebab kalimat **Ketuhanan yang Maha Esa** telah mewakili kehidupan beragama semua warga negara di Indonesia. Secara tidak langsung kalimat pada sila pertama ini memiliki kekuatan bahasa (*language power*) untuk menyatukan kehidupan beragama, menguatkan nilai toleransi beragama, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang beragama.

## Sila 2

### **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Sila kedua Pancasila ini memiliki tiga kata penting yang perlu dipahami yaitu: Kemanusiaan, Adil, dan Beradab. Kata-kata ini menjadi kunci utama dalam sila kedua. Secara leksikal “*kemanusiaan*” memiliki makna (1) sifat-sifat manusia, (2) perihal manusia, (3) sifat yang melandasi hubungan antarmanusia. (Tim Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023) Prinsip ini menekankan martabat dan kesetaraan seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, suku, jenis kelamin, agama, atau status sosial. Hal ini juga menyiratkan tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, serta menumbuhkan budaya perdamaian, toleransi, dan kerja sama antar bangsa. Prinsip ini juga mendorong penanaman budi pekerti luhur, seperti kejujuran, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Kata “*Adil*”

memiliki makna (1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, (2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, (3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Sedangkan kata “*Beradab*” (1) mempunyai adab; mempunyai budi bahasa yang baik; berlaku sopan, (2) telah maju tingkat kehidupan lahir batinnya.<sup>2</sup>

Dari makna leksikal tersebut *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* memberikan pemahaman secara umum bahwa Bangsa Indonesia sangat mengutamakan nilai-nilai luhur dalam diri manusia yang tergambar dalam adat dan budaya bangsa Indonesia yakni gotong-royong, toleransi, berbudi luhur, dan saling menghargai harkat dan derajat antar manusia meskipun dari beragam ras, suku, agama, strata social, dan antar golongan.

Secara gramatikal makna kemanusiaan jika dianalisa secara kontekstual dengan mengacu pada adat dan budaya Bangsa Indonesia adalah makna yang berkaitan dengan nilai-nilai yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan mencakup rasa empati, kasih sayang, keadilan, dan beradab terhadap sesama manusia tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan.

Adil secara kontekstual berdasarkan karakteristik Bangsa Indonesia berarti memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap orang tanpa membedakan atau memihak. Adil juga berarti berpihak kepada yang benar dan berpegang pada kebenaran, serta tidak bertindak sewenang-wenang atau menzalimi orang lain. Adil adalah suatu keadaan

yang menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara pemberian dan penerimaan.

Adab secara umum dalam bermasyarakat dimaknai sebagai kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dalam bertindak dan bersikap, memiliki akhlak mulia untuk menjaga harga diri dan menjaga nama baik Bangsa Indonesia melalui sifat nasionalisme, patriotisme, dan moderasi beragama.

Sila kedua ini memiliki kekuatan bahasa (*language power*) yang mampu menjadikan Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang luhur budi pekerti, mampu memberikan konsep keadilan bagi masyarakat, meningkatkan rasa saling menghormati, tolong-menolong, dan menghargai antarsesama manusia yang beragam, menciptakan suasana damai dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, mendorong terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakat, mencegah terjadinya konflik, ketegangan, atau kekerasan yang disebabkan oleh ketidakadilan, dan juga memperkuat solidaritas bangsa.

### **Sila 3 Persatuan Indonesia Makna Persatuan**

Secara leksikal persatuan memiliki makna (1) gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) beberapa bagian yang sudah bersatu, (2) perserikatan; serikat, (3) perihal bersatu. (Tim Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023) Berdasarkan makna tersebut bisa disimpulkan bahwa persatuan merupakan kumpulan dari berbagai aspek atau suatu hal yang beragam dan tergabung menjadi satu

---

<sup>2</sup> Tim Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

kesatuan utuh.. Persatuan juga berarti menyatukan bermacam-macam corak ke dalam sebuah wadah sehingga menjadi satu. Persatuan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti sosial, politik, budaya, agama, dan lain-lain.

Jika diinterpretasikan secara gramatikal, ada kata “Indonesia” yang mengikuti kata persatuan. Maka itu apabila dirangkai dalam satu rangkaian kalimat, makna persatuan Indonesia adalah usaha untuk bersatu dalam keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, baik dalam hal suku, ras, agama, bahasa, adat-istiadat, budaya, maupun wilayah. Persatuan Indonesia juga berarti menghargai dan mengakui perbedaan-perbedaan tersebut sebagai kekayaan bangsa, serta memiliki rasa cinta, bangga, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara<sup>12</sup>. Persatuan Indonesia juga mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, persatuan juga dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama antara sesama warga negara. Persatuan ini diwujudkan dalam sebuah semboyan Bangsa Indonesia yakni "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan inilah yang menjadi pengikat seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mengakui satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.

Kekuatan bahasa (*language power*) yang terdapat pada sila ini yaitu kata “persatuan” dalam susunan gramatikalnya sebagai subjek kalimat mampu memberikan suatu rasa ikatan kuat pada masyarakat Indonesia yang multikultural, sehingga melalui kalimat “*Persatuan Indonesia*” seluruh masyarakat Indonesia menjadi merasakan bahwa mereka semua memiliki satu kesamaan yaitu: satu

ideologi dan satu negara yang harus mereka jaga bersama-sama. Hal inilah yang menyatukan Bangsa Indonesia hingga sampai saat ini yakni 78 tahun kemerdekaannya.

#### **Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Sila ke-4 ini memiliki memiliki beberapa kata yang perlu ditafsirkan secara tersendiri yaitu: Kerakyatan, hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan/perwakilan. Jika dianalisis satu persatu secara leksikal maka. (1) Kerakyatan memiliki makna leksikal: segala sesuatu yang mengenai rakyat; demokrasi; kewarganegaraan. (2) Hikmat memiliki makna leksikal: kebijakan; kearifan; kesaktian (kekuatan gaib). (3) Kebijaksanaan memiliki makna leksikal: kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya); kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. (4) Permusyawaratan berasal dari kata dasar musyawarah yang memiliki makna leksikal: pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan. (5) Perwakilan memiliki makna leksikal: segala sesuatu tentang wakil, kumpulan atau tempat wakil-wakil (kantor, urusan, tempat, atau kantor dan sebagainya); seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara dan bertindak atas nama. (Tim Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023)

Kata-kata tersebut dirangkai dalam satuan gramatikal menjadi “*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*”, jika

mengacu pada makna leksikalnya, maka pada susunan gramatikal kalimat tersebut dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan bahwa rakyat yang berstatus sebagai warga negara menjadi bagian utama dalam menentukan kepemimpinan suatu negara. Rakyat membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki integritas dalam memimpin, pemimpin dengan kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan berbagai masalah lainnya. Pemimpin tersebut ditentukan oleh rakyat melalui perundingan atau perembukan untuk mencapai suatu kesepakatan atau mufakat. Pemimpin itulah yang nantinya akan menjaga, mengarahkan, menjadikan kehidupan lebih baik, dan berkewajiban mewakili rakyat dalam penyampaian aspirasi rakyat. Asas ini meneguhkan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan demokratis. Hal ini juga menyiratkan partisipasi dan keterwakilan seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan, serta akuntabilitas dan transparansi pejabat publik. Prinsip ini juga menumbuhkan budaya musyawarah, konsultasi, dan konsensus antar pemangku kepentingan.

Jika diinterpretasikan berdasarkan karakteristik Bangsa Indonesia maka tiap kata tersebut memiliki suatu penafsiran sebagai berikut:

### **Makna Kerakyatan**

Kerakyatan adalah salah satu konsep penting dalam Pancasila, dasar negara Indonesia. Kerakyatan berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, yang diwakili oleh para pemimpin yang dipilih secara demokratis melalui

musyawarah atau pemilihan umum. Kerakyatan juga berarti bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerakyatan juga menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah, serta menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka. Kerakyatan juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal, kekeluargaan, dan keadilan sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

### **Makna Hikmat Kebijaksanaan**

Hikmat Kebijaksanaan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti (1) bahasa, (2) sejarah, dan (3) filsafat. (1) Dari segi bahasa, kata Kebijaksanaan berasal dari kata bijak yang berarti kepandaian akal budinya, pengalaman dan pengetahuan, atau kecakapan bertindak menghadapi kesulitan. Jadi, Hikmat Kebijaksanaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pikiran sehat, pengetahuan, dan pengalaman dalam mengambil keputusan yang adil dan bijak. (2) Dari segi sejarah, frasa Hikmat Kebijaksanaan merupakan hasil perumusan dari Panitia Sembilan yang dipimpin oleh Mohammad Yamin pada tahun 1945. Frasa ini dimaksudkan untuk menggambarkan karakter pemimpin Indonesia yang harus memiliki wawasan luas, mementingkan kepentingan rakyat, dan bertanggung jawab atas tindakannya. (3) Dari segi filsafat, Hikmat Kebijaksanaan dapat dipahami sebagai suatu etika politik yang mengutamakan nilai-nilai moral, kebenaran, dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Hikmat Kebijaksanaan juga menekankan pentingnya permusyawaratan atau perwakilan sebagai cara untuk mencapai kesepakatan bersama yang

menghormati hak-hak dan kewajiban semua pihak. Hikmat Kebijakan juga berarti toleransi dan kerjasama antara berbagai golongan, agama, dan etnis dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

### **Makna Permusyawaratan Perwakilan**

Permusyawaratan dan perwakilan adalah salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Permusyawaratan berarti proses mengambil keputusan secara bersama-sama dengan cara berdiskusi, berdialog, atau berdebat untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Perwakilan berarti sistem pemerintahan yang mengutus atau memilih wakil-wakil rakyat untuk menjalankan kekuasaan negara sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat.

*Language power* yang terdapat dalam sila ke-4 ini berdasarkan makna leksikal dan gramatikalnya serta membandingkan dan menyesuaikan sila keempat dengan perkembangan zaman dan situasi aktual di Indonesia, seperti tantangan globalisasi, reformasi politik, hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat sipil, dan juga penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum, legislasi, pengadilan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, maka susunan kalimat pada sila ini memiliki kekuatan untuk: (1) Menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama sebagai negara demokratis melalui kepemimpinan yang memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh sila tersebut, seperti menghormati kedaulatan rakyat, mengutamakan musyawarah dalam

mengambil keputusan, menghargai perbedaan pendapat, dan bertanggung jawab atas hasil musyawarah. Menunjukkan bahwa rakyat adalah sumber dari segala kekuasaan negara, sehingga rakyat berhak untuk menentukan nasibnya sendiri melalui sistem demokrasi. (2) Menghargai pendapat, aspirasi, dan hak-hak rakyat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (3) Menciptakan suasana yang harmonis, damai, dan adil dalam masyarakat dengan mengedepankan musyawarah sebagai cara untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. (4) Mendorong partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan nasional melalui peran serta dalam organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau partai politik. (5) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati keragaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik yang ada di Indonesia.

### **Sila 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Makna leksikal menjadi dasar awal dalam menafsirkan makna gramatikal, pada sila ke-5 yakni *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia* ada beberapa kata yang perlu dipahami terlebih dahulu makna leksikalnya, yaitu. (1) Keadilan memiliki makna leksikal: sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil (sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang). (2) Sosial memiliki makna leksikal: sepatutnya; tidak sewenang-wenang; suka memperhatikan

kepentingan umum (suka menolong, menderma, dan sebagainya). (3) Rakyat memiliki makna leksikal: penduduk suatu negara; orang kebanyakan; orang biasa; pasukan (bala tentara); anak buah; bawahan.<sup>3</sup>

Berdasarkan makna leksikal tersebut dapat disimpulkan bahwa *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia* menekankan pada pentingnya menerapkan perbuatan, perlakuan, dan pengambilan keputusan yang mengutamakan aspek adil yaitu sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; bertindak sepatutnya; dan tidak sewenang-wenang. Semua ditujukan untuk terwujudnya nilai keadilan bagi semua masyarakat tanpa memandang status, golongan, atau hal lain yang bersifat mendeskriminasikan.

Sila ke-5 ini jika ditinjau dari makna gramatikalnya dan memperhatikan juga karakteristik dari Bangsa Indonesia, maka kalimat dalam sila tersebut dapat dimaknai secara terpisah, yaitu keadilan sosial dan rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah nilai yang mendorong penghormatan yang sama terhadap hak dan kewajiban setiap manusia dalam masyarakat tertentu. Keadilan sosial berfokus pada pemerataan semua aspek sosial untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan nilai sosial (kesejahteraan, keharmonisan masyarakat, menurunnya tingkat kriminalitas, lestariannya adat-istiadat serta nilai-nilai budaya di masyarakat, munculnya nilai empati dan simpati terhadap orang lain di sekitarnya, hubungan timbal balik antar manusia

dengan manusia lainnya dan lain-lain.). Maka itu aspek sosial juga berhubungan dengan identitas sosial yaitu konsep diri seseorang dalam lingkungan sosial, aspek sosial antara lain, etnis, jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama/keyakinan, asal negara, tingkat intelegensi, dll. Identitas sosial berpengaruh pada aspek sosial karena dengan identitas sosial yang dimiliki maka akan memunculkan cara pandang individu tersebut terhadap orang lain, dan cara pandang orang lain terhadap individu tersebut. Secara kompleks, maka ada kata "*seluruh rakyat Indonesia*" setelah kata "*keadilan sosial*". Kata "*seluruh rakyat Indonesia*" ini menjadi penekanan makna bahwa konsep "*keadilan sosial*" harus diterima oleh semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Sehingga tujuannya adalah seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang adil sehingga terwujudnya kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan dari interpretasi secara leksikal dan gramatikalnya maka, *language power* dalam sila ke-5 ini memberikan kekuatan makna dan kendali sosial yang mutlak diterima oleh seluruh warga negara Indonesia, yaitu: (1) menghormati hak asasi manusia dan hukum yang berlaku; (2) menjamin kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia; (2) memberikan perlindungan dan bantuan kepada kelompok-kelompok yang rentan atau tertindas; (3) mendorong partisipasi dan kerjasama antara anggota masyarakat; (4) mencegah dan menyelesaikan

---

<sup>3</sup> (Tim Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

konflik sosial dengan cara damai dan adil berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku, yakni menegakkan hukum secara tegas dan tidak diskriminatif.

## **2. Interpretasi *historical* (fakta dan waktu)**

Setiap tanggal 01 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hari tersebut juga ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah. Hal ini didasari oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa: (1) Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. (2) Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional. (3) Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Pemerintah Indonesia, Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila, 2016.

Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah dan masyarakat senantiasa mengingat bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Berdasarkan surat keputusan tersebut dapat dipahami bahwa sangat pentingnya mengetahui dan memahami sejarah lahirnya Pancasila.

### **Sejarah Singkat Hari Lahir Pancasila**

Kelahiran Pancasila berkaitan dengan berkecamuknya perang dunia kedua pada era tahun 40an. Saat itu, Belanda yang sudah sekian tahun menjajah di Indonesia dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh pasukan Jepang, sebab Jepang yang sebelumnya telah menduduki negara-negara Asia, akhirnya sampai juga di Indonesia. Pasca diusirnya Belanda dari Indonesia,

Jepang mulai membuat berbagai kebijakan yang salah satu tujuannya adalah supaya mereka dapat memenangkan perang melawan pihak sekutu. Terlebih lagi mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat yang artinya mereka sedang berhadapan dengan lawan tangguh. Karenanya, Jepang membutuhkan berbagai cara dan upaya untuk dapat mendapatkan kemenangan dalam konflik tersebut. Perjuangan yang dilakukan Jepang akhirnya berujung pada kekalahan. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu itulah Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah konkret dari janji tersebut, dibentuklah *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau juga dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan inilah salah satu badan yang berperan penting dalam sejarah singkat lahirnya dasar negara dan ideologi Bangsa Indonesia yakni Pancasila.

### **Rapat BPUPKI**

BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia sekaligus menyiapkan rencana kemerdekaan juga. Dalam menjalankan perannya, BPUPKI menggelar rapat atau sidang sebanyak beberapa kali (2 kali sidang besar tepatnya). Pada sidang pertamanya yang berlangsung dari tanggal 29 sampai 1 Juni 1945, salah satu agenda yang dibahas adalah perihal dasar negara Indonesia. Dalam persidangan itulah, Pancasila yang pertama kali diusulkan oleh Ir. Soekarno dirumuskan oleh para bapak bangsa. Tentunya usulan Soekarno tidaklah serta merta begitu saja diterima oleh para peserta sidang. Terdapat perbedaan pandangan antara

beberapa pihak. Perbedaan pendapat tidak hanya dalam hal dasar negara melainkan juga dalam hal bentuk negara dan hal-hal krusial lainnya.

### **Peran Panitia Sembilan**

Dikarenakan belum usainya pembahasan dalam sidang, diputuskanlah untuk membentuk sebuah komite untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dalam sidang. Komite ini kemudian dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan yang beranggotakan: (1) Soekarno, (2) Mohammad Hatta, (3) Achmad Soebardjo, (4) M. Yamin, (5) Wahid Hasjim, (6) Abdoel Kahar Moezakir, (7) Abikusno Tjokrosoejoso, (8) Haji Agus Salim, (9) A.A. Maramis

Kesembilan tokoh inilah yang akhirnya menyelesaikan pembahasan mengenai dasar-dasar negara termasuk juga Pancasila yang mana menjadi bagian penting dari sejarah singkat hari lahir Pancasila. Pembahasan dasar negara ini selesai pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berbunyi seperti berikut: (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Persatuan Indonesia. (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Disahkan Oleh PPKI**

Pancasila akhirnya baru benar-benar disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila yang disahkan pada hari itulah yang isinya telah direvisi

pada sila pertama menjadi ‘Ketuhanan yang Maha Esa’.

Sejak saat itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan berkaitan dengan aktivitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan Bangsa Indonesia. Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia, berarti sekaligus menciptakan bangsa yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, rasa kemanusiaan, demokratis, menjaga dan mempertahankan persatuan, memberikan secara utuh adil keadilan dan kesejahteraan.

### **3. Interpretasi retorikal**

Dalam mengkaji teks pancasila menggunakan metode hermeneutika, Interpretasi retorikal bertujuan untuk mengungkapkan maksud, tujuan, dan efek dari karya retorika. Interpretasi retorikal juga dapat mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan nilai dari karya retorika. Berdasarkan dua unsur yang telah dianalisis yakni interpretasi gramatikal dan interpretasi historikal, maka diambil suatu pemahaman melalui interpretasi retorikal, maka pada lima sila dalam teks pancasila, memiliki kekuatan sebagai berikut: (a) Teks pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang mencerminkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara, yang mengatur tata cara pemerintahan, hubungan antara pusat dan daerah, serta kedudukan Indonesia dalam pergaulan internasional. Selain itu Teks Pancasila juga menjamin perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial, Maka itu kalimat dalam teks Pancasila ini memiliki kekuatan

untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aspek hukum dan bernegara di Indonesia. (b) Teks pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung semangat perjuangan dan cita-cita kemerdekaan bangsa. Pada bagian ini kekuatan dari teks Pancasila adalah unsur sejarah yang melatar belakungnya, sehingga membuatnya menjadi suatu teks yang fenomenal dan menggambarkan jati diri Bangsa Indonesia. (c) Teks pancasila memberikan ikatan persatuan dan kesatuan yang kuat di tengah-tengah keberagaman masyarakat, keragaman budaya dan agama, keragaman adat istiadat, serta perkembangan perubahan kehidupan masyarakat dalam era globalisasi untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. (d) Teks pancasila memberikan kekuatan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju era kejayaan sebagai bangsa yang bermartabat dalam peradaban, yang mampu berkontribusi positif bagi kesejahteraan umat manusia.

Sedangkan unsur pendukung teks pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut: (a) Sejarah lahirnya Pancasila, yang mencerminkan perjuangan dan pengorbanan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan kolonialisme dan imperialisme. (b) Nilai-nilai Pancasila, yang meliputi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-nilai ini bersumber dari budaya dan religi bangsa Indonesia, serta memiliki karakteristik ideal, material, spiritual, pragmatis, logis, estetis, etis, sosial dan religius. (c) Pembukaan UUD 1945, yang merupakan rumusan resmi dari teks Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pembukaan UUD 1945 juga mengandung nilai-nilai luhur

seperti hak asasi manusia, demokrasi, persatuan nasional, kesejahteraan rakyat, dan ketertiban dunia. (d) Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menunjukkan bahwa teks Pancasila bukan hanya sekedar simbol atau slogan, tetapi juga pedoman dan arah bagi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional. Implementasi Pancasila juga menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman dengan tetap menjaga identitas dan keutuhan nasional Bangsa Indonesia.

Berdasarkan tiga aspek yang telah digunakan untuk menginterpretasikan teks Pancasila yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi historikal dan interpretasi retorikal, maka bentuk kekuatan bahasa (*langage power*) dalam teks Pancasila termasuk dalam bentuk kekuatan bahasa yang berpengaruh, yakni dengan menekankan pada: (a) penegasan, setiap kalimat dalam teks Pancasila menegaskan tentang aturan dan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan karakteristik Bangsa Indonesia; (b) penggunaan kalimat yang sarat muatan makna filosofi sehingga dapat membangkitkan emosi yang kuat (mengeksplorasi perasaan) dan membangun ikatan antara teks dengan pembaca (masyarakat Indonesia).

## SIMPULAN

Kekuatan bahasa yang terkandung dalam teks Pancasila memiliki peranan penting yang menjadi dasar ideologi negara. Hal inilah yang perlu dipahami secara komprehensif oleh seluruh bangsa Indonesia. Namun kebanyakan masyarakat Indonesia hanya memahami teks Pancasila ini sebagai teks dalam sisi formalitas saja, tidak

memahami kekuatan bahasa yang terkandung di dalamnya. Maka itu untuk memahami kekuatan bahasa dalam teks Pancasila ini dibutuhkan kajian hermeneutika agar dapat menafsirkan tiap kalimat dalam teks Pancasila. Teks Pancasila ini terdiri dari lima sila yang menekankan pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Masing-masing kata tersebut disusun dalam sebuah kalimat yang memiliki makna dan penafsiran mengandung unsur kekuatan Bahasa (*Language Power*). Secara umum dengan berdasarkan pada karakteristik Bangsa Indonesia, kelima sila tersebut dapat diinterpretasikan: (1) Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, mengandung nilai ketuhanan yang berarti pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya satu Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini juga menghormati kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama. (2) Sila kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, mengandung nilai kemanusiaan yang berarti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani. Nilai ini juga mencerminkan persamaan derajat, harkat, dan martabat manusia serta saling mencintai dan menghormati sesama manusia. (3) Sila ketiga, *Persatuan Indonesia*, mengandung nilai persatuan yang berarti kesadaran dan kebanggaan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang beraneka ragam dalam bahasa, suku, agama, budaya, dan sejarah. Nilai ini juga menunjukkan sikap nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air serta menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Sila keempat, *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, mengandung nilai kerakyatan yang

berarti kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam sistem demokrasi. Nilai ini juga mengandung prinsip musyawarah untuk mufakat, kebijaksanaan, keadilan, dan kepentingan bersama. (5) Sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, mengandung nilai keadilan yang berarti pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Nilai ini juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, penghargaan terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta pengembangan potensi diri dan lingkungan.

Dengan memahami *language power* dalam teks Pancasila ini, maka Bangsa Indonesia akan lebih memahami bagaimana konsep kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berideologikan teks Pancasila dengan baik, benar, dan tepat dalam berbagai aspek kehidupan di Negara Indonesia. Sehingga Ideologi Pancasila ini akan terjaga sampai kapan pun, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, pemerintah, dan warga Negara Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian tentang hermeneutika *language power* pada teks Pancasila ini dapat terselesaikan dengan baik melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang yang berupa literatur yang sesuai dan relevan dengan bidang kajian, maka terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga yang menaungi pelaksanaan penelitian ini yakni Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang.

## REFERENSI

Acep Iwan Saidi. (2008). Hermeneutika, sebuah cara untuk memahami teks. *Jurnal*

- Sosioteknologi*, 7(13), 376–382.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bagus, L. (2005). *Kamus Filsafat* (Keempat). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Diarsa, I. G. M. S. (2011). Hermeneutik dalam konteks arsitektur (merupakan sebuah metode dalam perancangan arsitektur). *Singhadwala*, 44, 11–18.
- Magnis Suseno Franz. (2022). Di Abad Ke-21: Pancasila Apa Masih Diperlukan? *Jurnal Pancasila*, 3(2), 1–12.
- Palmer, R. E. (2005). *Hermeneutika: Teori Baru mengenai Interpretasi*. Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, P. (2018). Lingkaran Hermeneutika dan Pancasila. *Caritas pro Serviam*, 36(1), 16–27. <https://asmistmaria.ac.id/wp/caritas-pro-serviam-edisi-xxxvi-juli-2018/>.
- Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila, Pub. L. No. Nomor 24 Tahun 2016, 1 (2016).
- Portal Informasi Indonesia*. (2023). <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>.
- Prasetio, D. E. (2023). Pancasila sebagai Pengembangan Moral Virtual dalam Perspektif Living Ideology. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 125–133.
- <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.151>.
- Sugianto, F., Michael, T., & Mahatta, A. (2021). Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmusebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum. *Negara Hukum*, 12(2), 307–328.
- Sumaryati, & Sukmayadi, T. (2021). Kebenaran Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pandangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 408–416.
- Suryatni, L. (2014). Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1), 34–47. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.101>
- Tim Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Daring). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>